



## DPRD DIY Kecam Keras Penganiayaan Anak di Daycare Little Aresha

**YOGYA, TRIBUN** - DPRD DIY mengecam keras dugaan kasus penelantaran dan penganiayaan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha Yogyakarta. Kasus ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY, Anton Prabu Semendawai, menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara maksimal oleh seluruh pihak, baik pemerintah, pengelola layanan, maupun masyarakat.

"DPRD DIY mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap anak dan menegaskan tidak ada toleransi dalam penanganannya. Kami mendorong pengusutan tuntas dengan sanksi maksimal bagi pelaku, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan pengawasan daycare melalui penguatan regulasi dan peningkatan standar pengasuhan agar kejadian serupa tidak terulang," tegasnya, Selasa (28/4).

DPRD DIY juga mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, transparan, dan berkeadilan dalam menangani kasus ini agar memberikan efek jera serta menjamin rasa aman bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan daycare, termasuk aspek perizinan, standar operasional, serta kompetensi tenaga pengasuh.

Langkah ini penting sebagai upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi, sekaligus memastikan bahwa seluruh fasilitas penitipan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) benar-benar memenuhi standar keamanan

dan perlindungan bagi anak.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Totok Daryanto merasa miris sekaligus malu, lantaran peristiwa keji ini justru terjadi di wilayah yang menyandang predikat sebagai Kota Pelajar dan Kota Budaya.

Menurutnya, tindakan pengikatan anak-anak dalam durasi lama bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk kekerasan berat yang mengancam tumbuh kembang korban. Oleh sebab itu, Totok secara gamblang menyatakan kekhawatirannya terkait apa yang terungkap di Yogyakarta ini hanyalah fenomena gunung es.

"Menurut saya ini peristiwa yang sangat luar biasa. Terjadinya sudah sekian lama dan dari jenis tindakannya merupakan bentuk kekerasan yang cukup berat. Dampaknya juga sangat besar," ujarnya, Selasa (28/4).

Totok pun mendesak pemerintah daerah supaya tidak hanya menyelesaikan kasus ini secara hukum, tetapi melakukan perbaikan sistemik. Ia menekankan pentingnya merumuskan kebijakan konkret mengenai pengawasan dan pengetatan izin operasional fasilitas penitipan anak agar kejadian serupa tak terulang.

"Mari kita benahi peraturan-peraturan masalah perizinan dan lain sebagainya. Persyaratan untuk melakukan pelayanan penitipan anak dan sebagainya itu harus diperbaiki," tegasnya.

"Keselamatan anak-anak adalah tanggung jawab kolektif yang tidak bisa ditawar. Peristiwa ini harus yang terakhir, tidak boleh lagi terjadi di Yogyakarta dan Indonesia. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama," tambah Totok. **(aka/hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 17 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005